

Kertas Posisi mengenai Presidensi G20 Indonesia

Rekomendasi dari Anggota Parlemen ASEAN bagi Hak Asasi Manusia

Juni 2022

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak jatuhnya Presiden Suharto pada 1998, dari kediktatoran militer menjadi demokrasi yang dinamis di mana sebagian besar warganya menikmati kebebasan politik yang lebih besar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, disertai dengan penurunan angka kemiskinan lebih dari setengahnya dalam dua puluh tiga tahun terakhir, Indonesia telah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan aktor yang semakin berpengaruh di kawasan dan sekitarnya.

Dengan memegang Presidensi G20 pada November tahun ini, Indonesia, satu-satunya anggota Asia Tenggara dari organisasi tersebut, memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan di tingkat global sebagaimana telah ditunjukkannya sebagai pendiri dan tuan rumah Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Bukanlah hal yang baru bagi Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam pergaulan tingkat dunia. Seawal tahun 1955, Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Bandung, sebuah momen penting yang mengarah pada pembentukan Gerakan Non-Blok. Sejak itu, dunia telah sangat banyak berubah, tetapi Indonesia mendapati dirinya sekarang dalam posisi di mana negara ini dapat sekali lagi menyuarakan aspirasi Global Selatan.

Untuk semua alasan di atas, kami, Anggota Parlemen dari Asia Tenggara, mendesak Pemerintah Indonesia menggunakan posisinya yang unggul di G20 untuk mempromosikan suatu bentuk kolaborasi kolektif dan inklusif di antara negara-negara untuk mengatasi berbagai tantangan, dengan gaungnya yang khas di kawasan kita, yang mempengaruhi kemanusiaan secara keseluruhan.

Di antaranya adalah kebutuhan akan tanggapan global yang lebih kuat dan kreatif terhadap kehancuran akibat konflik seperti yang terlihat di Myanmar; dukungan keuangan global yang meningkat secara substansial untuk transisi energi yang berkelanjutan; meredakan dampak perubahan digital dunia atas hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Menuju tanggapan global terhadap kehancuran akibat konflik seperti di Myanmar

2022 kemungkinan akan diingat sebagai tahun ketika Rusia, satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada komunitas internasional dengan secara brutal menginvasi Ukraina dan membawa perang ke depan pintu Eropa. APHR mengusulkan agar Indonesia juga menggunakan sejarah, keragaman, dan statusnya yang unik untuk mengusulkan Kelompok Kerja baru di G20 guna membahas tanggapan yang bijaksana dari kelompok perekonomian terbesar di dunia ini, tidak hanya terhadap krisis di Ukraina, tetapi juga di Suriah, Yaman, atau, di kawasan kita, Myanmar.

Semua perang ini memiliki beragam akibat kehancuran kemanusiaan, sosial, dan ekonomi yang tidak hanya berhenti di batas-batas negara: mulai dari kenaikan harga, kekurangan pasokan makanan dan energi, hingga peningkatan perdagangan manusia, produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata. Di Myanmar saja kemiskinan telah meroket ke tingkat yang tidak pernah terlihat dalam 20 tahun sebelumnya.

Masyarakat para bangsa sangat membutuhkan kesempatan yang tidak biasa agar cara-cara kreatif untuk mencegah kerugian manusia dan ekonomi dari krisis semacam itu dapat didiskusikan, yang berfungsi sebagai saluran pelengkap bagi organisasi-organisasi global seperti PBB, atau kelompok regional seperti ASEAN, yang sering gagal untuk mencegah kekejaman, atau meringankan konsekuensi terburuk dari perang ini. G20 harus menjadi salah satunya dan Indonesia secara unik ada pada kedudukan yang tepat untuk memulai diskusi tersebut.

Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, telah berhasil menempatkan kembali militernya ke barak. Sejarah kediktatoran, gejolak, dan demokratisasi di negara itu belakangan ini telah memberinya kekayaan pengalaman yang tak ternilai yang dapat memberikan keuntungan tersendiri dalam sudut pandangya mengenai konflik dan berikut segala konsekuensinya.

Karena itu, Indonesia harus menggunakan presidensi ini untuk membantu mengidentifikasi cara-cara inovatif untuk merasionalisasi serangkaian konsekuensi keuangan dan ekonomi yang koheren bagi pemerintah yang melakukan kekejaman; menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian, dan; mengejar stabilitas yang perlu bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pasca konflik.

Secara khusus, sebagai satu-satunya anggota G20 yang juga merupakan anggota ASEAN, Indonesia ada dalam posisi unik untuk memastikan bahwa 20 perekonomian terbesar dunia tidak mengabaikan bencana ekonomi yang ditimbulkan oleh junta Myanmar terhadap 54 juta penduduk negara itu. Mengingat letaknya yang dekat dengan tempat penyelenggaraan G20 dan kebutuhannya yang sangat besar akan bantuan kemanusiaan, Myanmar adalah titik awal yang wajar untuk diskusi mengenai bentuk-bentuk aksi ekonomi berhadapan dengan kekejaman yang semakin meluas.

Meningkatkan dukungan keuangan global bagi transisi energi yang berkelanjutan

Dalam memprioritaskan transisi energi berkelanjutan dalam agenda G20-nya, Indonesia telah mengakui pentingnya mengambil tindakan bersama untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan transisi ke sumber energi terbarukan.

Memang sesungguhnya, risiko yang ada tidak pernah lebih tinggi. [Studi terbaru](#) dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB telah mengonfirmasi bahwa janji saat ini dari berbagai negara untuk mengurangi emisi karbon tidak akan cukup untuk memperlambat perubahan iklim. Jika dunia tetap pada jalurnya saat ini, kenaikan suhu rata-rata global yang akan dihadapi dapat mencapai lebih dari 3° Celcius, lebih besar dua kali lipat dari target 1,5° Celcius yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.

Semua negara harus mengurangi emisi global sebesar 43% dan mencapai emisi karbon nol bersih (net-zero carbon) pada awal tahun 2050-an untuk menghindari bencana iklim, dan pengurangan paling penting harus dilakukan di sektor energi. Menerapkan transisi energi berkelanjutan adalah cara yang paling efisien dan tepat biaya (cost effective): dengan turunnya biaya secara besar-besaran selama dekade terakhir, energi bersih kini menjadi terjangkau dan mempertahankan sistem energi yang bergantung pada bahan bakar fosil menjadi lebih mahal dibandingkan jika beralih ke infrastruktur energi bersih.

Sebagai langkah penting, Indonesia harus memimpin G20 agar setuju untuk mempercepat penghentian penggunaan batubara dan bahan bakar fosil, serta harus juga secara substansial meningkatkan dukungan keuangan global untuk transisi tersebut. Proses ini akan berdampak serius pada perekonomian padat batubara termasuk negara-negara seperti Indonesia, di mana [hanya 2% dari potensi energi terbarukan](#) yang telah dimanfaatkan. Karena itu, Indonesia presidensinya ada dalam posisi yang unik untuk mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan komitmen keuangan dan bantuan mereka kepada negara-negara yang menghadapi hambatan besar dalam transisi energi mereka.

IMF juga telah mencapai konsensus dengan G20 untuk membuat cadangan devisa tambahan (Special Drawing Rights, SDRs) baru, senilai \$650 miliar, untuk mengatasi epidemi COVID-19 dan krisis iklim. Ini bisa memberikan [mekanisme keuangan yang layak](#) bagi negara-negara di Global Selatan untuk berjuang melawan krisis iklim. Namun, kemajuan ini bisa terhambat jika SDRs hanya direalokasi sebagai pinjaman. Sebagai penyambung suara untuk Global Selatan di G20, Indonesia harus mempromosikan investasi yang berkeadilan menuju transisi energi dengan memastikan bahwa SDRs dialokasikan sebagai hibah alih-alih pinjaman.

Meredakan dampak transformasi digital atas demokrasi dan hak asasi manusia

Transformasi dan perkembangan ekonomi digital menjadi semakin relevan setelah pandemi COVID-19 melumpuhkan dunia. Ketika ekonomi dan masyarakat pada umumnya semakin bergerak ke arah digitalisasi, kita tidak dapat lagi mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh “raksasa teknologi”, atau perusahaan-perusahaan besar teknologi, khususnya Google, Amazon, Meta, dan Apple, dalam membentuk tidak hanya

perekonomian, tetapi juga kondisi demokrasi dan hak asasi manusia secara global.

Layanan yang ditawarkan oleh raksasa teknologi ini membutuhkan biaya besar. Dengan mengumpulkan dan menjual data pribadi kita untuk memprediksi dan membentuk perilaku konsumen, mereka melacak perilaku daring kita di setiap tampilan, klik, pembelian, dan interaksi, untuk menganalisis dan memonetisasinya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan besar ini dibalik data pribadi orang banyak [lebih besar daripada sejumlah PDB terbesar di dunia](#).

Cara mereka menghasilkan uang tanpa ada aturan yang mengikat juga memungkinkan mereka mengambil untung dari penyebaran disinformasi, perpecahan, dan kebencian. Secara global, gejala ini merusak demokrasi, stabilitas, dan kohesi sosial.

Disinformasi dalam pemilu yang akan datang membawa dampak buruk pada demokrasi di Filipina. Di Myanmar, Facebook digunakan sebagai alat propaganda oleh ultra-nasionalis untuk menyuarakan retorika anti-Muslim mereka, yang mengarah pada kekerasan ekstrem terhadap Rohingya dan minoritas Muslim lainnya. Terobosan yang dilakukan oleh sayap kanan di beberapa negara Eropa berutang banyak pada propaganda daring dan disinformasi. Baru-baru ini, taktik ini telah digunakan oleh pemerintah Rusia untuk membenarkan invasi brutalnya ke Ukraina di mata penduduknya.

Saat [Indonesia memimpin](#) perampingan isu digital di berbagai kelompok kerja G20 dan menggalang transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi yang tangguh, Indonesia harus memastikan bahwa diskusi ini tidak terjadi tanpa upaya mengatasi kerusakan yang dibawa model bisnis raksasa teknologi atas hak individu dan demokrasi di seluruh dunia.

Negara-negara G20 mewakili pasar yang signifikan bagi perusahaan raksasa teknologi, karena itulah kelompok ini memiliki kesempatan yang unik untuk membahas dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diadopsi untuk mengatur pasar digital agar sejalan dengan demokrasi; mengakhiri penggunaan data pribadi secara invasif; meminta platform daring bertanggung jawab atas model bisnis mereka yang berbahaya, dan melindungi demokrasi kita.